Pranatan Anyar

KR-Asrul Sani

Petani memanen bunga krisan di Kulonprogo.

SELAMA PANDEMI PESANAN SEPI

Petani Bunga Krisan Berhenti Produksi

KULONPROGO (KR) - Selama pandemi Covid-19, petani bunga krisan nyaris tidak mendapat orderan. Akibatnya mereka berhenti produksi. Menurut Ketua Paguyuban Pengelola Bunga Krisan Seruni Menoreh, Kulonprogo, Suharno, sejak awal Maret silam kalangan petani bunga krisan tak mampu berproduksi, lantaran pelanggan seperti hotel dan dekorasi yang selama ini biasa membeli, sejak pandemi tidak ada lagi permintaan.

"Sampai September lalu, pesanan bunga krisan sangat sepi," kata Suharno baru-baru ini.

Lantaran sepi pesanan, menyebabkan sejumlah petani bunga krisan mengalihfungsikan lahannya untuk menanam sayur mayur. Ironisnya upaya tersebut juga tidak membuahkan hasil karena harga sayuran juga turun.

Diungkapkan Suharno, dari 50 anggota Paguyuban Pengelola Bunga Krisan Seruni Menoreh, hanya enam anggota yang masih bertahan menanam bunga krisan. "Anggota paguyuban yang menanam mungkin bisa panen dan dijual akhir Desember nanti. Sekarang pesanan sudah mulai ada dari Bantul, Kotabaru Yogya dan Wates, tapi jumlahnya terbatas," ujarnya.

Lurah Gerbosari Damar menjelaskan, Pemerintah Kalurahan telah berupaya membantu para petani krisan yang mengalami nasib kurang baik tersebut, dengan mendata mereka untuk disusulkan sebagai penerima Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT DD). Sementara apabila ada yang tidak masuk kriteria akan dimasukkan ke BLT dari APBD dan Pemda DIY. **(Rul)-d**

9.000 ASN Temanggung Wajib Tes Swab

TEMANGGUNG (KR) - Seluruh aparatur sipil negara (ASN) dan guru di Kabupaten Temanggung harus menjalani tes swab untuk memastikan kesehatan dan pengendalian penularan Covid-19. Mereka yang terpapar harus menjalani perawatan di RS atau isolasi mandiri.

Sekda Kabupaten Temanggung Agung Prabowo mengatakan, penularan Covid-19 di Temanggung telah menyebar di semua kalangan termasuk pada ASN dan guru, sehingga diperlukan langkah-langkah pengendalian, antara lain dengan tes usap atau tes swab.

"Perlu langkah cepat, agar kasus Covid-19 pada ASN dan guru tidak semakin menyebar. Mereka yang terkonfirmasi isolasi mandiri dan bekerja dari rumah. Setelah sembuh baru kembali ke kantor," kata Agung, Kamis (10/12).

Sekretaris I Satgas Penanganan Covid-19 Temanggung itu mengatakan, *swab test* rencananya minggu depan di semua instansi dan sekolah secara bertahap.

Ia menjelaskan, tes usap pertama kali akan dilakukan di lingkungan Sekretariat Daerah (Setda) Temanggung, kemudian berlanjut ke kantor-kantor instansi pemerintahan lainnya. "Kurang lebih ada 9.000 ASN di Temanggung, mereka wajib mengikuti tes swab tanpa terkecuali," tegas Agung. **(Osy)-d**

CEGAH LONJAKAN KASUS, WONOGIRI TUTUP OBWIS

Pandemi Sudah Lama, Kesadaran Warga Melemah

WONOGIRI (KR) - Bupati Wonogiri Joko Sutopo menyebutkan, melonjaknya kasus positif Covid-19 di daerahnya dipicu banyak hal. Salah satunya, tingkat kesadaran masyarakat akhir-akhir ini sudah melemah karena pandemi sudah relatif lama melanda dunia termasuk daerah Wonogiri.

Hal itu diungkapkan Joko Sutopo usai Rakor Penanggulangan Covid-19 di Ruang Giri Manik Setda Wonogiri, Kamis (10/12).

Menurut Joko, adanya pelonggaran atas kegiatan masyarakat berbasis kultur seperti izin hajatan, menjadi pemicu naiknya angka pasien positif Covid-19. "Kasus yang banyak terjadi saat hajatan famili yang ada di luar kota mudik sehingga muncul klaster perjalanan," kata pria yang akrab disapa Mas Jekek sembari menambahkan, anggota keluarga yang ada di rumah (hajatan) menjadi OTG atau orang tanpa gejala Covid-19.

Hasil rakor yang melibatkan hampir seluruh kepala OPD di Setda Wonogiri juga mengantisipasi penyebaran Covid-19 dari klaster pariwisata. "Makanya tadi kita sepakati penutupan objek wisata (obwis) di Wonogiri menjelang libur panjang akhir tahun," ungkap Jekek seraya menambahkan, surat keputusan bupati untuk penutupan obwis di Wonogiri akan segera dikeluarkan.

Bupati Wonogiri mengaku prihatin lonjakan pasien Covid-19 terjadi sejak dirinya mengambil cuti menjelang Pilkada Bupati. Karena itu, setelah Pilbup dirinya mengambil langkah cepat dengan menggelar rakor terpadu untuk menekan angka pasien baru Covid-19. **(Dsh)-d**

10 HARI MASA TRANSISI DARI KABUPATEN

Tim Satgas Kalurahan Lakukan 12 Pemakaman

KULONPROGO (KR) - Di masa transisi penyerahan urusan pemakaman jenazah secara protokol kesehatan pencegahan Covid-19 dari Tim Gugus Tugas Kabupaten Kulonprogo ke kalurahan, Tim Satuan Tugas (Satgas) Covid-19 Kalurahan di Kulonprogo telah melaksanakan sebanyak 12 kali pemakaman warga yang meninggal dunia di rumah sakit.

Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kulonprogo Ariadi mengatakan, mulai Desember 2020 Tim Gugus Tugas Dekontaminasi Kulonprogo tidak lagi melaksanakan pemakaman jenazah.

Para relawan Tim Gugus Tugas Dekontaminasi Kabupaten memberikan pendampingan terhadap proses pemakaman yang dilakukan oleh Tim Satgas Kalurahan.

"Pada hari kesepuluh masa transisi ini sudah 12 kali memberikan pendampingan pemakaman jenazah dengan prokes Covid-19," tutur Ariadi, Kamis (10/12).

Kepala Seksi Kedaruratan dan Logistik BPBD Kulonprogo Edi Wibowo menjelaskan, Tim Dekontaminasi Kabupaten kemarin juga memberikan pendampingan pemakaman di Kalurahan Gerbosari, Kapanewon Samigaluh. Sebelumnya memberikan pendampingan Satgas Pemakaman Kalurahan Salamrejo, Nomporejo, Wates, Margosari, Pendoworejo dan Tuksono. "Hampir setiap hari memberikan pendampingan pemakaman," ujar Edi Wibowo.

Ariadi menjelaskan dari sebanyak 12 kali pendampingan, jenazah yang dimakamkan belum tentu terkonfirmasi Covid-19. Untuk pencegahan penularan virus, pemakaman jenazah suspek atau probabel tetap dengan prosedur prokes.

Selain tidak melakukan pemakaman, katanya, Tim Gugus Tugas Kabupaten juga tidak lagi melakukan dekontaminasi atau penyemprotan disinfektan. Penyemprotan dekontaminasi diserahkan ke Satgas Kalurahan juga. **(Ras)-d**

GUBERNUR JATENG SETUJU KARANTINA PEMUDIK

Pemkot Solo Diminta Buat 'Call Center'

SEMARANG (KR) - Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo minta kepada Pemkot Solo untuk membuat *call center*, terkait rencana pemberlakuan karantina 14 hari kepada seluruh pemudik. *Call center* itu penting agar masyarakat bisa berkomunikasi tentang kebijakan yang diambil Pemkot Solo.

Demikian dikatakan Ganjar Pranowo di Semarang, Kamis (10/12). Walikota Solo FX Hadi Rudyatmo akan memberlakukan karantina terhadap semua pemudik pada libur panjang akhir tahun nanti. Karantina selama 14 hari akan dilaksanakan di Rumah Karantina Technopark, Jebres, Solo. "Pak Walikota sudah bicara pada saya. Walikota Solo ingin membuat *equal treatment*, yaitu perlakuan yang sama. Dan kondisi Covid-19 di Jateng ini perlu pengendalian cukup serius. Saya kira, ide Pak Walikota yang akan mengkarantina mereka yang datang dari luar daerah itu baik," kata Ganjar.

Dengan kebijakan tersebut, masyarakat yang ingin masuk Solo diminta melakukan komunikasi. Dengan demikian Pemkot Solo harus membuat *call center* sebagai tempat komunikasi dan menerima laporan masyarakat agar semua lancar.

Gubernur menilai, Solo Raya memang harus dikendalikan, mengingat daerah itu masih tinggi penyebaran Covid-19. Meski begitu, Ganjar minta agar kebijakan karantina bagi setiap pendatang dikomunikasikan dengan masyarakat.

Dengan kebijakan karantina bagi pemudik, diharapkan orang tidak keluar masuk dan tidak terkontrol. Apalagi mereka yang tidak pernah tahu kondisinya, apakah dalam kondisi sehat atau tidak. Untuk itu masyarakat diminta agar tidak berpikir negatif, karena Walikota Solo ingin memberikan perlindungan pada warganya agar selamat.

Ganjar juga mendukung rencana Pemkot Semarang melakukan penutupan di sejumlah ruas jalan utama. Kebijakan tersebut diharapkan bisa mengurangi potensi kerumunan. "Sensitivitas kepala daerah menjadi penting karena penyebaran Covid-19 masih tinggi," tegasnya seraya meminta kepala daerah lain di Jateng untuk melakukan pengetatan. Kontrol terhadap potensi kerumunan harus diperketat agar masyarakat sadar bahwa kondisi saat ini belum baik. Untuk itu Pemerintah harus melakukan intervensi dengan cara yang bisa mengurangi kerumunan.

Meski minta pengetatan kegiatan masyarakat, tetapi Gubernur mengatakan tidak semua kegiatan masyarakat dilarang, seperti acara pernikahan, diperbolehkan asal tertib dan jumlahnya terbatas. Lebih baik resepsi ditunda dulu, yang penting akad nikahnya dilaksanakan. Perayaan hari besar keagamaan, boleh dilaksanakan dengan jumlah terbatas. **(Bdi)-d**

SULTAN INGATKAN MASYARAKAT LEBIH HATI-HATI

Penularan Covid-19 Mengarah Kerabat Dekat

YOGYA (KR) - Penambahan kasus Covid-19 di DIY tidak hanya karena perjalanan luar kota, tapi penularan juga terjadi dari orang terdekat, baik tetangga maupun kerabat dekat. Karena itu, masyarakat harus lebih berhati-hati dan wajib menaati protokol kesehatan (prokes) pencegahan Covid-19.

"Sekarang penularan Covid-19 tidak hanya dikarenakan seseorang habis melakukan perjalanan dari luar kota. Karena saya lihat dalam report setiap hari ada seseorang tertular (pasien) nomor sekian. Nomor sekian menulari nomor sekian. Kecenderungan tetangga sudah ada yang kena. Untuk itu saya minta masyarakat lebih waspada dan hati-hati," tandas Gubernur DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X di Kepatihan, Yogyakarta, Kamis (10/12).

Menurut Sultan, penegakan prokes jadi kewajiban. Contohnya saat terjadi kerumunan sebuah komunitas di Yogyakarta beberapa waktu lalu yang melanggar prokes dan terpaksa harus dibubarkan. Sultan berharap peristiwa tersebut tidak terjadi lagi.

Juru Bicara Pemda DIY untuk Penanganan Covid-19 Berty Murtiningsih mencatat terjadi lagi 191 penambahan kasus positif Covid-19 di DIY, menjadi 7.612 kasus. Dari 34 persen konfirmasi positif, berdasarkan riwayatnya sebesar 40 persen di antaranya terjadi dalam keluarga.

Kemarin, Gubernur DIY memimpin Rakor Penanganan Covid-19 DIY, di Ndalem Ageng, Kepatihan, Yogyakarta. Hadir antara lain Wakil Gubernur DIY Paku Alam X, Sekda DIY Kadarmanta Baskara Aji, Staf Khusus Menteri Kesehatan Jajang Edy Priyatno, Kepala Dinas Kesehatan DIY Pembajun Setyaningastutie, Kepala Pelaksana BPBD DIY Biwara Yuswantana, Kepala Satpol PP DIY Noviar Rahmad, dan Forkompimda DIY.

"Melihat angka dan riwayat tracing, sepertinya penularan sudah mengarah antartetangga atau kerabat dekat. Untuk itu, saya mempersilakan masukan untuk menyikapi hal itu," ujar Sultan.

Sedangkan Jajang Edi Priyatno pada kesempatan itu antara lain menyampaikan soal perkembangan program vaksinasi Covid-19 di Indonesia.

Mengenai pengajuan penambahan nakes untuk Rumah Sakit (RS) Rujukan Covid-19 di DIY, Jajang menyampaikan, telah disiapkan oleh Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (PPSDM) Kemenkes. Mereka sudah memetakan, paling tidak untuk melakukan penyebaran nakes yang sudah sekian bulan berjuang menangani pasien Covid-19. **(Ira/Ria)-d**

BANYAK KLASTER KELUARGA

Perketat Prosedur bagi Pendatang

KULONPROGO (KR) - Lonjakan kasus harian Covid-19 di Kabupaten Kulonprogo didominasi dari para pendatang dan pelaku perjalanan (PP). Salah satu cara untuk mengantisipasi kemunculan klaster keluarga yang lebih banyak lagi, yakni dengan mengetatkan prosedur yang berlaku bagi para pendatang.

"Sebelumnya, kasus di Kulonprogo terbilang minim dan paling kecil dibandingkan daerah lain di DIY. Namun memasuki masa adaptasi kebiasaan baru (AKB) banyak pendatang masuk Kulonprogo," kata Ketua Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Kabupaten Kulonprogo Fajar Gegana, Kamis (10/12).

Aktivitas masuk dan keluar daerah juga jadi lebih intens seperti ketika masa normal sebelum pandemi melanda. Rata-rata kasus akhir-akhir ini datang dari pendatang, orang mudik atau pelaku perjalanan, jadinya ada penularan. Salah satu cara mengantisipasi kemunculan klaster keluarga, dengan mengetatkan prosedur yang berlaku bagi para pendatang.

"Setibanya di Kulonprogo, mereka wajib menjalankan karantina selama 14 hari atau melakukan *rapid test* dan *swab test*. Sebelum hasil tes keluar, tidak diperkenankan melakukan kontak dengan anggota keluarga lainnya. Masyarakat juga harus selalu mematuhi protokol kesehatan meliputi pemakaian masker, jaga jarak, jauhi kerumunan dan cuci tangan di air mengalir," tandasnya. **(Wid)-d**

KASUS COVID-19 MEMPRIHATINKAN

Harus Ada Pembatasan di Tempat Umum

YOGYA (KR) - Wakil Ketua DPRD DIY Huda Tri Yudiana mengatakan, kasus Covid-19 di DIY dalam beberapa hari terakhir sangat memprihatinkan. Dibutuhkan tindakan signifikan guna mengurangi laju pertambahan penularan yang sudah sangat masif.

"Kami sudah memantau langsung di berbagai rumah sakit dan layanan kesehatan di DIY. Kondisinya sangat memprihatinkan. Tempat tidur khusus pasien Covid-19 penuh di berbagai RS. Tenaga medis sudah sangat kelelahan luar biasa. mereka juga sangat berisiko tertular. Ini realitas yang harus disikapi serius," ujar Huda, Kamis (10/12).

Sementara untuk Pilkada serentak, sejauh ini di DIY berlangsung baik. Berdasarkan pantauan di Tempat Pemungutan Suara (TPS) secara umum juga dilaksanakan sesuai protokol kesehatan, meski di Bantul ada Kelompok Petugas Pemungutan Suara (KPPS) yang terkonfirmasi positif Covid-19.

"Selama protokol kesehatannya dilakukan, saya optimis tidak akan jadi klaster baru. Namun, *tracing* tetap harus dilakukan. Karena ini bagian dari upaya meminimalisasi penambahan kasus positif," ungkapnya.

Hal yang perlu mendapatkan perhatian Pemerintah sekarang menurut Huda, adalah upaya pencegahan di tempat-tempat umum yang justru sangat minim dalam penerapan protokol kesehatan. Perlu penegakan dan pembatasan serius. **(Awh)-d**

MESKI VAKSIN COVID-19 SUDAH ADA

Cegah Penularan Tetap dengan 3T dan 3M

JAKARTA (KR) - Meski sudah ada vaksin Covid-19 dan di Indonesia juga sudah datang sebagian vaksin yang dipesan, namun upaya pencegahan penyebaran Covid-19 tetap harus dengan 3T *(tracing, testing, treatment)* serta 3M (memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, menjaga jarak menghindari kerumunan).

KR-Istimewa

Ali Gufron Mukti

Ali Gufron Mukti, Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi Covid-19 Kemenristek/BRIN mengajak semua pihak agar tetap menjalankan protokol kesehatan dengan baik, meski vaksin sudah ada. "Sebab kunci utama dalam mencegah penyebaran Covid-19 adalah dengan 3M dan untuk memutus mata rantai penularan penting dilakukan 3T," tandas Ali Gufron, Kamis (10/12).

Dikatakan, Pemerintah serta seluruh pimpinan di tingkat provinsi/kabupaten/kota akan terus bekerja keras untuk bisa melayani masyarakat yang terdampak Covid-19. Sebab, keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi.

Selain menerapkan 3M dan 3T, Ali Gufron juga mengingatkan kepada masyarakat agar tetap meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing, sehingga manusia akan tetap mendapat perlindunganNya.

"Kita harus meningkatkan juga keimanan dan ketakwaan kita, sesuai agama kita masing-masing. Di samping itu, olahraga secara teratur, menjaga pola makan, mengatur waktu tidur dan menjaga emosional juga wajib dilakukan. Sebab, hal itu menjadikan imunitas dapat terjaga dengan baik, sebagai pondasi utama tubuh dari ancaman virus," papar Ali Gufron.

Menurutnya, masyarakat harus meningkatkan imunitas tubuh dengan cara olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, tidak boleh begadang, minimal harus tidur selama enam jam. **(Ati)-d**